

LAPORAN KEBERLANJUTAN
TAHUN 2024
PT CIPTADANA MULTIFINANCE

Plasa ASIA Office Park Unit 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190 Indonesia

Telp. +62 21 2557 4895, Fax. +62 21 5140 1020

Email. cmf@ciptadana.com

www.ciptadana-mf.co.id

Dibuat :

**Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang
Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan,
Emiten dan Perusahaan Publik**

BAB I

STRATEGI KEBERLANJUTAN

1.1 Rencana Strategis Bisnis

Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris memiliki peran aktif dalam pembuatan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan serta monitoring terhadap pelaksanaannya dengan fokus perhatian terhadap keselarasan sektor ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan terdapat prinsip - prinsip yang diterapkan oleh Perusahaan:

1) Prinsip bisnis yang bertanggung jawab

Dalam prinsip bisnis yang bertanggung jawab, Perusahaan harus melihat bahwa penguatan terhadap setiap organ perusahaan memiliki tujuan agar semua bagian dari perusahaan memiliki kesamaan visi untuk dapat mengembangkan serta meningkatkan daya saing perusahaan, sehingga perusahaan terus dapat bertumbuh, tanpa melupakan faktor sosial dan lingkungan sebagai bagian dari perubahan perusahaan dalam proses bertumbuh.

2) Prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan

Program kerja Perusahaan terbagi atas jangka pendek dan jangka panjang, faktor penentu dari keberhasilan program kerja tersebut memerlukan dukungan penuh dari semua karyawan, jajaran Dewan Komisaris dan Direksi.

Selain hal tersebut, kebijakan internal perusahaan dan *Standart Operating Procedure* juga perlu disesuaikan serta disempurnakan agar Perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis semakin terarah dan memiliki pedoman.

3) Prinsip pengelolaan risiko sosial dan Lingkungan Hidup

Selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengukur risiko yang terjadi, termasuk dalam mengukur risiko sosial dan lingkungan hidup. Mulai melakukan identifikasi, pengukuran, mitigasi, pengawasan dan pemantauan kedua risiko tersebut sehingga dapat menghindari, mencegah, dan meminimalkan dampak yang timbul akibat eksposur risiko yang terkait dengan aspek sosial dan Lingkungan Hidup.

4) Prinsip tata kelola

5 prinsip tata kelola yang dijalankan oleh Perusahaan yaitu:

- **Transparansi:** Perusahaan harus menjalankan kegiatan bisnis ini dengan memperhatikan keterbukaan dalam mengambil keputusan sehingga terhindar dari adanya kepentingan pribadi serta harus terbuka dalam penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh pihak lain.

- Akuntabilitas: adanya kejelasan fungsi dan pelaksanaan dari masing-masing peranan organ perusahaan sehingga lebih efektif dan efisien dalam menjalankan praktik bisnis.
- Bertanggungjawab: setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan lain dari Regulator agar setiap bisnis yang dijalankan sehat.
- Independen: Perusahaan harus mandiri dan bebas dari benturan kepentingan manapun sehingga pembiayaan yang dilakukan tidak berdasarkan kepentingan satu pihak atau adanya titipan dari satu pihak yang berkuasa untuk Perusahaan melakukan pembiayaan demi keuntungan pribadi pihak tertentu.
- Kesetaraan dan kewajaran: Perusahaan harus mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan dari berbagai sisi dalam menjalankan praktik bisnisnya. Tidak hanya untuk keuntungan Perusahaan dan keuntungan pihak yang dibiayai saja, tetapi Perusahaan juga harus menilai keadilan bagi masyarakat sosial dan keadilan bagi lingkungan hidup.

5) Prinsip komunikasi yang informatif

Perusahaan wajib menyediakan dan menyiapkan secara periodik laporan Keuangan Berkelanjutan yang telah dilaksanakan. Laporan yang disampaikan harus bertanggung jawab dan disampaikan melalui media komunikasi yang efektif dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

6) Prinsip inklusif

Perusahaan memiliki akses yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang akan memanfaatkan produk/jasa yang dipasarkan oleh Perusahaan. Perusahaan memiliki situs *website* serta kontak pihak-pihak maupun alamat *email* yang dapat ditanyakan perihal produk/jasa yang dimiliki oleh Perusahaan. Perusahaan juga melaksanakan program Literasi kepada masyarakat sebagai salah satu bagian pengenalan produk dan jasa keuangan di perusahaan.

7) Prinsip koordinasi dan kolaborasi

Perusahaan menyelaraskan strategi/kebijakan, peluang bisnis dan inovasi produk dengan memperhatikan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, termasuk mempertimbangkan sektor-sektor yang diprioritaskan sesuai dengan sektor unggulan yang diprioritaskan oleh pemerintah.

Perusahaan dapat berkolaborasi dengan pihak lain untuk menyelaraskan dan mensukseskan pelaksanaan Aksi Keuangan Berkelanjutan atau berpartisipasi aktif dalam forum/kegiatan/kerjasama baik untuk skala regional maupun nasional yang berhubungan dengan Penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Dengan penerapan strategis yang berdasarkan prinsip-prinsip di atas, maka selanjutnya Perusahaan dapat menjalankan Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan dengan baik beserta perlakuan yang diperlukan atas risiko-risiko yang akan terjadi.

1.2 Strategi Komunikasi

Komunikasi yang dijalani oleh Perusahaan adalah komunikasi 2 (dua) arah yang transparan yang diyakini dapat menjalin hubungan yang baik dengan semua pemangku kepentingan. Komunikasi dua arah dengan pihak eksternal yang terbuka dibangun melalui berbagai aktivitas komunikasi dan pengelolaan media komunikasi yang dimiliki, diantaranya melalui email perusahaan, *website* dan juga telepon.

Sebagai bagian dari strategi komunikasi yang mengedepankan transparansi, maka pihak eksternal akan dapat dengan mudah mengakses semua publikasi yang dilakukan oleh Perusahaan, seperti misalnya laporan keuangan tahunan yang dimasukkan ke *website* perusahaan.

Sedangkan komunikasi internal yang transparan bertujuan agar dapat menciptakan suasana kondusif untuk mendukung pencapaian kinerja serta sebagai upaya untuk memastikan bahwa semua karyawan telah memiliki kesamaan informasi terkini.

Perusahaan melakukan aktivitas komunikasi internal dengan melalui email dan Portal *Ciptadana Office Automation System*. Komunikasi dua arah yang terbuka dan transparan di dalam internal, akan memungkinkan adanya kebijaksanaan atas perintah kerja atasan maupun masukan yang semata-mata untuk memajukan Perusahaan ke arah yang lebih baik. Hal ini tentu saja didukung sikap profesional antar sesama karyawan agar komunikasi yang terjalin berjalan efektif dan pada akhirnya setiap organ dapat mencapai *goal* yang telah ditetapkan oleh Perusahaan dalam situasi lingkungan kerja yang nyaman.

1.3 Sistem *monitoring*, evaluasi dan mitigasi

Sistem *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja di seluruh unit kerja Perusahaan telah memiliki mekanisme sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam rangka *monitoring* perkembangan pelaksanaan program kerja dari seluruh unit kerja baik dari kinerja keuangan maupun non keuangan, Direksi menyelenggarakan rapat Direksi secara periodik sebulan sekali, dan Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris setidaknya triwulanan.

2. *Key Performance Indikator*

KPI atau *Key Performance Indikator* merupakan alat ukur kinerja unit dan individual untuk menciptakan budaya kerja yang efektif dan memastikan evaluasi yang lebih terukur sehingga dapat menjadi dasar untuk pemberian *reward and punishment* yang akan membuat karyawan menjadi lebih termotivasi untuk memberikan kontribusi yang maksimal.

3. Reguler meeting dan *briefing*

Reguler meeting dan *briefing* dapat diadakan setiap saat baik oleh Direksi ataupun oleh sesama karyawan dari staff hingga head, dalam membahas berbagai permasalahan yang timbul sebagai bagian dari aktifitas bisnis yang dijalankan.

Dari sisi mitigasi, mitigasi yang dilakukan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan system pengendalian internal yang menganut konsep *Three Lines of Defense* yang melibatkan unit bisnis sebagai *First Line of Defense*, unit kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan sebagai *Second Line of Defense* yang melakukan peningkatan fungsi *check and balance* guna mendukung kegiatan bisnis yang lebih prudent, serta unit kerja Audit Internal sebagai *Third Line of Defense* yang melakukan audit secara berkala sebagai bagian dari peningkatan budaya sadar risiko.

2. Manajemen Risiko

Secara konsisten Perusahaan menerapkan manajemen risiko dalam setiap aktivitas operational dan non operational, penerapan manajemen risiko menjadi kepedulian semua unit kerja dalam setiap level organisasi. Pengelolaan risiko sesuai dengan ketentuan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan, yaitu risiko strategi, risiko operasional, risiko aset dan liabilitas, risiko kepengurusan, risiko tata kelola, risiko dukungan dana, dan risiko pembiayaan.

BAB II

IKHTISAR KINERJA ASPEK KEBERLANJUTAN

2.1 Aspek Ekonomi

Perusahaan berkomitmen untuk memajukan Aksi Keuangan Berkelanjutan, tetap cermat dalam meneruskan dan bekerjasama dengan Developer yang mengedepankan AMDAL dalam membangun perumahan maupun apartemen, selain itu juga cermat dalam memberikan pembiayaan kepada Debitur pertambangan ataupun perkebunan yang mengedepankan pentingnya dampak lingkungan hidup atau memiliki program reboisasi dan rehabilitasi setelah melakukan kegiatan bisnisnya.

Sejak tahun 2020, Perusahaan melakukan pembiayaan secara lebih konservatif, melakukan adaptasi dalam menjalankan proses bisnis, termasuk melakukan percepatan proses digitalisasi yang juga merupakan bagian dari rencana aksi keuangan berkelanjutan dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan kertas.

Perusahaan merencanakan melaksanakan keuangan berkelanjutan dengan berkolaborasi dengan pihak ketiga, selain bekerjasama dengan Developer yang mengedepankan AMDAL dalam membangun perumahan ataupun apartemen sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan yang buruk, Perusahaan juga memperhatikan sektor ekonomi Debitur. Apabila Debitur dengan sektor ekonomi yang memiliki resiko terhadap kelangsungan kehidupan hayati seperti sektor ekonomi di perkebunan, pertambangan, maupun *furniture* maka perlu memperhatikan program yang dimiliki Debitur dalam melakukan reboisasi atau rehabilitasi atas lahan atau objek yang digunakan dalam kegiatan bisnis sehingga tidak merusak lingkungan hidup.

2.2 Aspek Lingkungan Hidup

Program Perusahaan untuk melakukan pengurangan penggunaan kertas dapat dilaksanakan secara efisien karena telah hampir sepenuhnya menggunakan sistem internal yang terus disempurnakan dan melakukan komunikasi dengan Debitur maupun pihak ketiga lainnya menggunakan *email*. Untuk internal, dapat menggunakan kertas bekas pada saat mencetak draft yang perlu didiskusikan lebih lanjut sehingga tidak membuang kertas.

Perusahaan terus berupaya untuk menggunakan pengurangan botol plastik untuk tamu maupun karyawan. Gelas keramik mulai dipergunakan kembali untuk menyuguhkan minuman kepada tamu dari pihak luar. Setiap karyawan menggunakan botol minum maupun gelas keramik pada masing-masing meja sehingga tidak membeli air mineral dalam kemasan botol plastik.

2.3 Aspek Sosial

Penerapan Aksi Keuangan berkelanjutan ini membawa beberapa dampak bagi lingkungan maupun masyarakat baik dampak positif maupun dampak negatif.

Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan yang berfokus pada kelestarian lingkungan memiliki dampak positif:

1. Lingkungan menjadi lebih asri dan mengurangi kerusakan pada bumi terutama mengurangi efek dari *global warming*;
2. Mengedukasi dan menyadarkan masyarakat untuk lebih bijak dalam menjalankan kegiatan usaha untuk *concern* kepada kesehatan lingkungan;
3. Merehabilitasi daerah-daerah yang menjadi pusat kegiatan bisnis untuk perkebunan, pertambangan, *furniture* maupun kegiatan bisnis lainnya yang berhubungan dengan lingkungan hidup;
4. Membuat perusahaan-perusahaan berkembang ke arah digitalisasi dan berfokus pada sistem sehingga mengurangi penggunaan kertas dan file-file yang kemungkinan besar dapat hilang atau rusak.

Disisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan ini juga memiliki dampak negatif yaitu beberapa hambatan-hambatan yang dialami berupa:

1. Kesiapan Sumber Daya Manusia dan sistem teknologi informasi yang masih harus mengalami peningkatan dan pembaharuan yang memakan waktu;
2. Masih banyak pelaku usaha yang mengabaikan pentingnya AMDAL dan reboisasi atau rehabilitasi serta keasrian lingkungan yang selaras dengan kegiatan bisnis;
3. Produk atau jasa yang menitik beratkan kepada keasrian lingkungan cenderung asing dan masih jarang sehingga baik penerbitan produk atau jasa maupun penggunaan produk atau jasa masih belum banyak yang menggunakannya.

BAB III PROFIL

3.1 Visi, Misi dan Nilai

Visi

Menjadi 5 (lima) besar Perusahaan jasa keuangan di Indonesia yang menjadi *one stop solution* bagi Debitur.

Misi

- Memperbaiki Infrastruktur berbasis IT agar pembiayaan dapat berjalan proper dan sesuai dengan SOP;
- Memberi nilai tambah kepada *stakeholder* dengan cara memelihara hubungan baik dengan perbankan, Debitur dan investor melalui peningkatan kinerja perusahaan, kualitas aset dan pelaksanaan GCG secara konsisten.

Nilai Keberlanjutan

Menjalankan kegiatan usaha yang dapat menjaga keselarasan antara keuntungan dan kelestarian lingkungan, mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip Keuangan Berkelanjutan, serta menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

3.2 Nama dan Alamat

PT Ciptadana Multifinance

Plaza ASIA Office Park Unit 2

Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12190

Telp : 021-25574800, Fax: 021 51401020

Email : cmf@ciptadana.com

www.ciptadana-mf.co.id

3.3 Skala Usaha

Tahun	Aset	Ekuitas	Liabilitas
2023	324.651.257.122	316.798.909.465	7.852.347.657
2024	139.401.297.060	134.827.171.349	4.574.125.712

Pada tahun 2024, Perusahaan mencatat total aset sebesar Rp. 139 miliar, lebih rendah dari tahun 2023. Penurunan ini terjadi disebabkan oleh jumlah piutang pembiayaan neto, yang sebagian besar merupakan dampak dari strategi perusahaan untuk lebih selektif dalam

menyalurkan dan menjaga kualitas portofolio pembiayaan. Sedangkan posisi liabilitas tahun 2024 hanya mencatatkan sebesar 4,5 miliar, karena Perusahaan sepenuhnya menggunakan dana dari pemegang saham tanpa memiliki pinjaman dari pihak lain.

Jumlah Sumber Daya Manusia

Kriteria	Pria	Wanita
Jenis Kelamin	9	9
Jabatan		
Staff	5	6
Head	2	1
Direksi	1	1
Komisaris	1	1
Usia :		
25 -35 tahun	2	2
36 – 45 tahun	3	2
46 – 55 tahun	2	3
56 – 65 tahun	2	1
Pendidikan		
SMA	2	-
D3	-	1
S1	5	7
S2	2	1
Status Ketenagakerjaan		
Tetap	8	9
Kontrak	1	-

3.4 Penjelasan mengenai Produk, Layanan dan Kegiatan Usaha

Produk dan cara pembiayaan Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Investasi
 - a. Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*)
 - b. Jual dan Sewa Balik (*Sale and Lease Back*)
 - c. Anjak Piutang (*Factoring*)
 - d. Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran (*Installment Financing*)
2. Pembiayaan Modal Kerja
 - a. Anjak Piutang (*Factoring*)
 - b. Jual dan Sewa Balik (*Sale and Lease Back*)
 - c. Fasilitas Modal Usaha
3. Pembiayaan Multiguna
 - a. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran (*Installment Financing*)

- b. Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*)
 - c. Fasilitas Dana
4. Sewa Operasi

Layanan yang disediakan Ciptadana Multifinance yang dapat digunakan oleh Debitur adalah:

1. Calon Debitur (*Lessee*) mengajukan permohonan dengan surat dan/atau aplikasi yang telah disiapkan oleh Perusahaan;
2. Perusahaan akan meminta kepada Calon Debitur (*Lessee*) untuk melengkapi dan menyerahkan semua data dan persyaratan yang ditentukan;
3. Perusahaan akan melakukan verifikasi dan pengecekan data yang telah diberikan oleh Calon Debitur (*Lessee*);
4. Jika semua data dan persyaratan telah dipenuhi maka Perusahaan akan memproses permohonan Calon Debitur (*Lessee*) lebih lanjut;
5. Penandatanganan kesepakatan pembiayaan (akad kredit);
6. Pencairan dana dari Perusahaan kepada Calon Debitur (*Lessee*);
7. Calon Debitur (*Lessee*) mulai melakukan kewajiban pembayaran/angsuran sesuai kesepakatan kepada Perusahaan, dalam pembayaran kewajiban Perusahaan menyediakan berbagai fasilitas guna mempermudah pembayaran, diantaranya:
 - Pembayaran via *Virtual Account* melalui ATM di Bank
 - Pembayaran via Transfer ke Bank CIMB. Niaga
 - Pembayaran melalui fasilitas *auto debt* sesuai dengan jangka waktu pembayaran

Persyaratan Umum dalam pengajuan fasilitas pembiayaan yang wajib dipenuhi oleh Calon Debitur adalah sebagai berikut:

Perseorangan

- Fotocopy KTP/SIM/Paspor calon Calon Debitur (*Lessee*)
- Fotocopy KTP/SIM/Paspor Suami/Isteri calon Calon Debitur (*Lessee*)
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy Surat Nikah/Cerai
- Fotocopy Perjanjian Kawin (Pisah Harta)
- Fotocopy Surat SBKRI
- Fotocopy Surat Ganti Nama (untuk pasangan WNA)
- Fotocopy NPWP
- Fotocopy Rekening Tabungan/Koran Aktif (3 bulan terakhir)
- Fotocopy Slip Gaji
- Asli Surat Keterangan Bekerja

- Fotocopy Surat Ijin Praktek / Ijin Usaha (untuk prosesional/pengusaha)
- Fotocopy Surat Keanggotaan Profesi (untuk profesional)

Badan Hukum

- Fotocopy seluruh Anggaran Dasar beserta Perubahan-perubahannya
- Fotocopy Pengesahan Dept. Kehakiman Tentang AD / Perubahan AD
- Fotocopy Surat Ijin Usaha
- Fotocopy NPWP Perusahaan
- Fotocopy Tanda Daftar Badan Hukum
- Fotocopy Surat Ket. Domisili Badan Hukum
- Surat Kuasa kepada Pihak yang Mewakili Badan Hukum
- Fotocopy KTP Pihak yang Mewakili Badan Hukum
- Fotocopy Rekening Tabungan/Koran Aktif (3 bulan terakhir)
- Fotocopy Neraca & Laporan Rugi/Laba (2 tahun terakhir)

3.5 Keanggotaan

Sebagai Perusahaan Pembiayaan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perusahaan masuk dalam keanggotaan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Selain itu OJK juga mewajibkan Perusahaan Pembiayaan untuk terdaftar sebagai anggota Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Perusahaan juga masuk dalam keanggotaan PT Rapi Utama Indonesia (Rapindo) yaitu pendaftaran aset yang merupakan obyek jaminan dari perusahaan pembiayaan.

BAB IV PENJELASAN DIREKSI

4.1 Kebijakan untuk Merespon Tantangan dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan

Aksi Keuangan Berkelanjutan dinilai merupakan sesuatu hal yang positif baik bagi Pelaku Jasa Keuangan, lingkungan hidup maupun bagi masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sangat kaya akan hasil alamnya dan merupakan paru-paru dunia dengan keanekaragaman hutannya. Namun sayangnya, semakin banyak pelaku bisnis maupun masyarakat yang abai akan pentingnya kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati, banyak terjadi kerusakan dan bahkan beberapa kekayaan hayati pun terancam punah. Demi keuntungan bisnis dan hanya mempertimbangkan aspek komersial semata, banyak pelaku usaha maupun masyarakat yang dengan sadar mengorbankan lingkungan hidup.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Perusahaan memandang baik adanya penerapan aksi keuangan berkelanjutan ini. Meskipun kegiatan operasional perusahaan tidak memberi dampak langsung yang signifikan terhadap lingkungan, tetapi perusahaan berkomitmen untuk turut berpartisipasi mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan melalui kegiatan usaha perusahaan.

Hal inilah yang melatarbelakangi Perusahaan untuk menyesuaikan nilai dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan menjalankan kegiatan usaha yang dapat menjaga keselarasan antara keuntungan bisnis dan kelestarian lingkungan, mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip Keuangan Berkelanjutan, serta menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

4.2 Penerapan Keuangan Berkelanjutan

4.2.1 Kinerja Keuangan Berkelanjutan Aspek Ekonomi

Keterangan	Realisasi Juni 2024	Realisasi Desember 2024
Total Aset	224.253.151.238	139.401.297.060
Total Liabilitas	3.980.047.096	4.574.125.712
Total Ekuitas	221.007.238.950	134.827.171.349
Total Pendapatan	5.745.004.821	12.564.368.530
Total Beban	5.701.567.203	8.998.023.094
Laba (Rugi) Setelah Pajak	(95.669.227.521)	(1.849.295.123)

Pada semester kedua tahun 2024 penurunan total asset disebabkan atas strategi Perusahaan untuk melakukan pembatasan pemasaran produk yang tidak memiliki kualitas profitabilitas yang baik, hal ini menyebabkan terjadinya penurunan jumlah piutang.

Penurunan total ekuitas pada semester kedua disebabkan oleh dampak hasil pemeriksaan langsung oleh OJK atas beberapa fasilitas yang sebelumnya memiliki kualitas lancar dinyatakan macet, yang mengakibatkan jumlah pencadangan (CKPN) lebih besar dan mengakibatkan penurunan laba Perusahaan.

Pada semester pertama tahun 2024, dengan pendapatan sebesar 5,745 milyar dan beban sebesar 5,701 milyar, maka rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) adalah sebesar 99.24%. Sedangkan pada semester kedua tahun 2024, pencapaian pendapatan sebesar 12.5 milyar dan beban sebesar 8.9 milyar, sehingga rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) 71.62% hal ini menunjukkan perbaikan yang signifikan dan merupakan wujud keberhasilan dari strategi Perusahaan untuk fokus meningkatkan profitabilitas Perusahaan di tahun 2024 dengan pembatasan pemasaran produk yang tidak memiliki kualitas yang baik.

4.2.2 Kinerja Keuangan Berkelanjutan Aspek Sosial

Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Perusahaan dan mengendalikan risiko reputasi, untuk itu Perusahaan berkomitmen untuk menyelenggarakan pengembangan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, baik melalui pelaksanaan training internal, sertifikasi kompetensi sesuai yang diarahkan oleh regulator ataupun pelatihan eksternal.

Dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat, Perusahaan memiliki komitmen dalam melaksanakan tanggung jawab kepada Debitur, sehingga sepanjang tahun 2024 tidak memiliki keluhan yang diterima, baik keluhan yang diterima melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK ataupun yang diterima melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perusahaan.

4.2.3 Kinerja Keuangan Berkelanjutan Aspek Lingkungan Hidup

Kebijakan yang diambil oleh Perusahaan dalam upaya untuk mengurangi penggunaan kertas adalah menggunakan kertas bekas untuk mencetak draft atau bakan yang digunakan untuk melakukan diskusi dengan sesama karyawan maupun dengan manajemen.

Perusahaan juga terus meningkatkan kualitas sistem teknologi informasi sehingga kegiatan operasional bisnis dan pelaporan dapat dilakukan secara otomatis tanpa adanya proses manual. Penerapan Keuangan Berkelanjutan dari sisi aspek lingkungan juga mengalami tantangan yang harus dilalui, penggunaan tanda tangan secara digital sebagai upaya untuk mempercepat proses bisnis dan mengurangi penggunaan kertas memerlukan sinkronisasikan dengan sistem teknologi informasi yang saat ini dimiliki, pada tahun 2024 Perusahaan melakukan peninjauan dengan beberapa perusahaan yang menyediakan jasa

tanda tangan secara elektronik dan melakukan uji coba penggunaannya. Pelaksanaan uji coba dengan beberapa vendor telah dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal utama seperti keamanan, kenyamanan serta efisiensi penggunaan terhadap *user-user* yang akan menggunakannya dikemudian hari.

4.3 Strategi Pencapaian Target

Perusahaan terus berupaya untuk menjalankan kegiatan operasional dan bisnis perusahaan sejalan dengan nilai keberlanjutan dengan semakin cermat dan mengedepankan prinsip *prudent* dalam mengambil langkah konservatif untuk menyalurkan pembiayaan. Melakukan inovasi dalam menjalankan kegiatan usaha, termasuk meningkatkan infrastruktur teknologi informasi sebagai bagian dari pengurang resiko dan efisiensi merupakan langkah yang diambil dalam menyikapi tantangan yang ada.

Perusahaan berkomitmen untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan mengurangi penggunaan listrik dan kertas. Perusahaan juga terus mencari peluang dengan bekerjasama dengan Developer maupun perusahaan lainnya yang mengedepankan kelestarian lingkungan dan merambah untuk dapat bekerjasama dalam pembiayaan kepada UMKM atau *retail* yang berfokus juga kepada kelestarian lingkungan.

BAB V

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

5.1 Uraian Tugas Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, Pejabat dan/atau Unit Kerja yang menjadi Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Secara keseluruhan pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dikelola oleh Unit Kerja Kepatuhan, namun dalam pelaksanaannya didukung oleh unit - unit lain seperti Marketing, Unit Kerja Finance, Akunting & Tax, Unit Kerja Manajemen Risiko, HRD dan Legal.

Rincian tugas dan wewenang Unit Kerja dan pejabat yang berkaitan dengan Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan, adalah sebagai berikut:

a. Direksi

Bertanggungjawab terhadap pengelolaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan di Perusahaan secara keseluruhan.

b. Dewan Komisaris

Bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan atas kegiatan bisnis serta keputusan yang diambil oleh Direksi dalam komitmen menjalankan Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan.

c. Unit Kerja Kepatuhan

- Bertanggungjawab terhadap Direksi atas pengelolaan pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;
- Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perusahaan;
- Mengelola pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan di Perusahaan;
- Menyusun Pedoman Perusahaan untuk Aksi Keuangan Berkelanjutan;
- Monitoring pelaksanaan Aksi Keuangan Berkelanjutan;
- Menyusun Laporan Pelaksanaan Aksi Keuangan Berkelanjutan;
- Melakukan review dan rekomendasi terkait aspek kepatuhan terhadap Pelaksanaan Aksi Keuangan Berkelanjutan.

d. Unit Kerja Manajemen Risiko

- Monitoring atas risiko – risiko yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan Aksi Keuangan Berkelanjutan terutama Risiko Pembiayaan

e. Unit Kerja Finance, Accounting & Tax

- Pelaporan dan monitoring realisasi pembiayaan terkait Aksi Keuangan Berkelanjutan

- f. Unit Kerja HRD dan Legal
 - Melakukan proses rekrutment karyawan untuk mengisi unit kerja yang bertanggung jawab dalam mengelola Aksi Keuangan Berkelanjutan;
 - Bertanggung jawab atas training dan kemampuan karyawan terkait dengan Aksi Keuangan Berkelanjutan.
- g. Unit Kerja Marketing
 - Penyaluran pembiayaan kepada kegiatan Aksi Keuangan Berkelanjutan;
 - Penerbitan produk dan/atau jasa terkaitn Aksi Keuangan Berkelanjutan.

5.2 Penjelasan mengenai Pengembangan Kompetensi yang Dilaksanakan terhadap anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, Pejabat dan/atau Unit Kerja yang menjadi Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan masih mengalami kendala dalam penerapannya terutama untuk menyelaraskan dengan kegiatan bisnis Perusahaan sehingga diperlukan pelatihan maupun seminar atau *workshop* yang berkaitan penerapan ini sehingga Pelaku Jasa Keuangan memiliki arahan dan gambaran untuk melakukan kegiatan usaha yang relevan dengan Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan.

Pada tahun 2019 Direksi dan Dewan Komisaris telah mengikuti *workshop* dari OJK terkait dengan Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan. Direksi dan Dewan Komisaris telah memiliki pengetahuan dan gambaran terkait Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan yang kemudian dibagikan kepada pegawai terutama yang akan bertanggungjawab untuk melaksanakan Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa pegawai dan pejabat yang bertanggungjawab dalam Penerapan Keuangan Aksi Keberlanjutan untuk diikut sertakan dalam pelatihan mengenai Aksi Keuangan Berkelanjutan sehingga dapat menjalankan kegiatan usaha maupun program secara internal secara maksimal.

5.3 Penjelasan Mengenai Prosedur Perusahaan dalam Mengidentifikasi, Mengukur, Memantau, dan Mengendalikan Risiko atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait Aspek Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup

Berdasarkan POJK No. 42/POJK.05/2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya bahwa terdapat 8 jenis risiko, antara lain:

1. Risiko kredit

Risiko ini mengukur, memantau serta mengendalikan penyaluran pemberian pembiayaan dan fokus pemberian plafond khusus untuk penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan kepada Debitur maupun calon Debitur sehingga dapat menjalankan program kegiatan Aksi Keuangan Berkelanjutan.

2. Risiko pasar

Risiko ini mengukur, memantau serta mengendalikan sektor ekonomi Debitur maupun calon Debitur yang sangat relevan untuk mendukung penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan.

3. Risiko operasional

Risiko ini mengukur, memantau serta mengendalikan kegiatan operasi yang direncanakan untuk diterapkan secara maksimal.

4. Risiko strategis

Risiko ini mengukur, memantau serta mengendalikan strategi yang direncanakan oleh Perusahaan untuk menerapkan Aksi Keuangan Berkelanjutan agar penerapan dapat dilaksanakan secara maksimal.

5. Risiko likuiditas

Risiko ini mengukur, memantau serta mengendalikan kemampuan keuangan Perusahaan untuk dapat melaksanakan pembiayaan Aksi Keuangan Berkelanjutan.

6. Risiko hukum

Risiko ini mengukur, memantau serta mengendalikan setiap kegiatan Aksi Penerapan Keuangan Berkelanjutan aman dari segala tuntutan hukum dan tidak terdapat celah dapat dilakukannya tuntutan hukum.

7. Risiko kepatuhan

Risiko ini mengukur, memantau serta mengendalikan setiap kegiatan Aksi Keuangan Berkelanjutan yang telah direncanakan dan diterapkan tidak keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Regulator.

8. Risiko reputasi

Risiko ini mengukur, memantau serta mengendalikan setiap kegiatan Aksi Keuangan Berkelanjutan yang direncanakan dan diterapkan tidak merusak reputasi Perusahaan.

Selama tahun 2024 penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan telah dilaksanakan dengan berbagai keterbatasan dan kendala yang ada. Hal ini dijadikan peluang atau kesempatan bagi Perusahaan untuk dapat menyempurnakan serta melaksanakan Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan selanjutnya dengan lebih baik.

5.4 Penjelasan mengenai Pemangku Kepentingan

Dalam menerapkan Aksi keuangan Berkelanjutan memerlukan adanya pihak ketiga untuk mendukung terlaksananya penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan. Yang termasuk diantaranya dapat berupa Debitur, Developer maupun pihak lainnya yang bekerjasama dengan Perusahaan. Semua pihak yang terlibat dalam setiap kegiatan bisnis dan operasional Perusahaan, terutama yang terlihat dalam Keuangan Berkelanjutan diidentifikasi sebagai pemangku kepentingan yang diarahkan kepada kepentingan Perusahaan.

Adapun pihak-pihak tersebut diantaranya adalah pihak otoritas/regulator, pemegang saham, semua karyawan, Debitur, semua mitra bisnis, jajaran Direksi dan Dewan Komisaris serta masyarakat umum, mengacu kepada prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yaitu *Transparency* (keterbukaan), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (tanggungjawab), *Independency* (kemandirian), *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), Perusahaan tetap menjalankan kegiatan operasional dan bisnis dengan memberikan respon atas segala kondisi yang terjadi.

5.5 Permasalahan yang Dihadapi, Perkembangan dan Pengaruh terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan terdapat bermacam faktor yang bersumber dari internal dan eksternal. Faktor internal, Perusahaan menyadari masih minimnya pemahaman dari organ-organ Perusahaan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan dan menetapkan topic material serta batasannya.

Sedangkan dari faktor eksternal, terdapat perubahan dan penyesuaian peraturan maupun kebijakan dari Pemerintah yang dapat mempengaruhi aktivitas operasional Perusahaan. Namun, Perusahaan terus berusaha untuk mengatasi segala tantangan tersebut melalui kegiatan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan dan sosialisasi terkait penerapan prinsip berkelanjutan.

BAB VI
KINERJA KEBERLANJUTAN

6.1 Penjelasan Mengenai Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan di Internal Perusahaan

Perusahaan terus menyempurnakan sistem informasi teknologi untuk mengurangi penggunaan kertas. Perusahaan juga masih mengkaji dengan beberapa *vendor* perusahaan penyedia jasa penggunaan tandatangan digital yang akan diselaraskan dengan sistem informasi teknologi Perusahaan.

Dari sisi pembiayaan, Perusahaan berupaya untuk menyalurkan pembiayaan secara cermat dengan memilah sektor ekonomi yang mementingkan kelestarian lingkungan baik bahan baku produksi maupun hal-hal yang dilakukan perusahaan tersebut untuk mengembalikan keasrian lingkungan setelah pemanfaatan untuk menghasilkan produknya atau menggunakan bahan-bahan yang ramah terhadap lingkungan.

6.2 Uraian Kinerja Ekonomi dalam 3 Tahun Terakhir

Secara umum pencapaian kinerja selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Keterangan	2022	2023	2024	
	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi
Total Pembiayaan	279,048,975,301.00	242,917,004,757	292.955.905.983	57.241.197.561
Pembiayaan Investasi	202,711,126,510.00	175,539,744,568	169.212.038.635	37.573.561.784
Pembiayaan Modal Kerja	50,938,908,163.00	45,982,914,405	37.573.561.784	6.431.723.337
Pembiayaan Multiguna	25,398,940,628.00	21,394,345,784	60.447.759.944	13.235.912.440
Pendapatan	41,866,824,759.00	23,927,342,267	22.103.490.826	12.564.368.530
Laba Rugi	20,084,889,575	13,620,266,981	12.067.269.870	- 1.849.295.123

Pencapaian untuk tahun 2024 dari sisi total pembiayaan beserta dengan portofolio masing-masing pembiayaan (Investasi, Modal Kerja dan Multiguna) serta pendapatan dan laba rugi Perusahaan masih perlu ditingkatkan. Hal ini lebih disebabkan oleh strategi manajemen yang masih melakukan pembiayaan secara konservatif dan lebih prudent, lebih fokus

collection terutama untuk Debitur-debitur yang memiliki karakter baik serta kemampuan pembayaran kembali.

6.3 Kinerja Sosial dalam 3 Tahun Terakhir

Perusahaan selama ini cukup selektif dalam melaksanakan kegiatan usaha dan menyalurkan pembiayaan. Adanya fungsi APU PPT dalam melakukan skrining awal sehingga meningkatkan kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan agar tidak terkena masalah hukum dikemudian hari. Mitigasi risiko yang diterapkan juga cukup ketat sehingga kegiatan usaha Perusahaan seperti juga tercermin dalam laporan Tingkat Kesehatan Perusahaan yang dalam kondisi sehat.

Setiap pegawai yang bekerja di Perusahaan memiliki hak yang sama sesuai dengan jabatannya. Dalam hal merekrut pekerja, Perusahaan tidak menggunakan tenaga kerja di bawah umur. Perusahaan juga memberikan remunerasi yang sesuai dengan fungsi jabatan serta tugas dan tanggungjawabnya secara adil. Perusahaan juga mendukung perkembangan kompetensi pegawai dengan diberikan pelatihan dan sertifikasi yang diperlukan sehingga pegawai semakin dapat semakin memajukan lini bisnis Perusahaan. Selain itu penciptaan kondisi bekerja yang kondusif dan kompak sehingga sesama pegawai dapat bekerjasama dengan baik dan saling mendukung untuk memajukan kegiatan bisnis. Kondisi kerja yang kondusif meningkatkan semangat kerja atau etos kerja pegawai sehingga Perusahaan semakin berkembang dengan ide-ide dan inovasi-inovasi baru yang didukung secara penuh.

Adanya ketentuan dari OJK untuk melaksanakan literasi dan inklusi menjadikan peluang bagi Perusahaan untuk mengenalkan industri keuangan serta mengedukasi masyarakat mengenai dunia keuangan serta berbagi pengalaman mengenai dunia kerja dan *leadership*. Masyarakat diharapkan mendapatkan gambaran apa itu industri pembiayaan dan bagaimana *culture* dalam memasuki dunia kerja serta produk apa yang dapat digunakan dari industri pembiayaan. Tahun 2024, Perusahaan telah melaksanakan literasi sebanyak 2 kali dengan target masyarakat umum sehingga dengan adanya program ini diharapkan perusahaan dapat memberikan pemahaman serta ilmu terkait industri pembiayaan kepada masyarakat luas.

Perusahaan juga telah menyiapkan ruang untuk adanya pengaduan baik dari Debitur terkait dengan produk yang telah dimanfaatkan maupun ruang untuk masyarakat luar yang ingin mendapatkan informasi terkait produk-produk Perusahaan. Bagi Debitur dan Calon Debitur pengaduan dapat dilakukan langsung kepada divisi Pemasaran yang membawahi mereka, sedangkan bagi masyarakat luar dapat mengirimkan *email* ke alamat yang telah dicantumkan pada bagian profil serta dapat melaporkan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen.

6.4 Kinerja Lingkungan Hidup bagi Ciptadana Multifinance

Perusahaan menjalankan seluruh kegiatan secara menyeluruh di kantor. Karyawan diusahakan sudah meninggalkan kantor tepat waktu sehingga penggunaan energi listrik dapat berkurang. Perusahaan juga mengurangi penggunaan sampah plastik dengan cara menghimbau kepada seluruh karyawan untuk menggunakan minum menggunakan botol minum sendiri atau membawa gelas untuk mengurangi penggunaan air dalam kemasan plastik. Untuk tamu dari pihak luar disediakan gelas keramik dan teko *refill* untuk minum dan tidak menggunakan minuman dalam kemasan berbahan dasar plastik.

6.5 Kinerja Lingkungan Hidup bagi Ciptadana Multifinance yang Proses Bisnisnya Berkaitan Langsung dengan Lingkungan Hidup

Perusahaan berkantor pusat di DKI Jakarta, yang sebagaimana telah diketahui bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan peraturan untuk mengurangi penggunaan plastik untuk berbelanja dan ini sejalan dengan Perusahaan untuk mendukung mengurangi sampah plastik. Karyawan juga dihimbau untuk dapat menghargai lingkungan dengan bertanggungjawab terhadap lingkungan kerja agar bersih dari sampah dan tidak banyak menggunakan kertas dalam melakukan kegiatan usaha. Penggunaan kertas hanya untuk hal-hal yang memang bersifat perlu dan penting saja, sedangkan untuk mencetak draft atau bahan yang akan didiskusikan menggunakan kertas bekas.

6.6 Tanggungjawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Perusahaan masih terus menjajaki kemungkinan untuk memasuki pembiayaan sektor hijau ini secara perlahan. Selain itu untuk pembiayaan perumahan atau apartemen dapat juga melihat Developer yang kompeten dan memiliki AMDAL yang baik sehingga proyek yang dikerjakan tidak merusak lingkungan.

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Menyetujui Direktur	
Albertus Prasetyo Hanggoro	